

BAB IV

SIMPULAN

Kekalahan negara Jepang pada Perang Dunia II menuntut bangsa Jepang untuk bekerja lebih keras agar dapat memacu perekonomian negara mereka yang dahulu dihancurkan oleh perang. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan-perusahaan di negara Jepang menuntut para pekerjanya untuk bekerja lebih keras dengan cara menambah jam kerja mereka. Hal ini merupakan awal mula munculnya *karooshi* pada *sarariman* di Jepang.

Fenomena *karooshi* yang muncul pada *sarariman* di Jepang disebabkan oleh jam kerja yang berlebihan. Padahal jam kerja sudah di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan (*Ministry of Health, Labour and Welfare*), Undang-Undang Standar Perburuhan tahun 1947 yang menetapkan bahwa pengusaha tidak akan memiliki pekerja yang bekerja lebih dari 8 jam perhari setiap harinya, dalam seminggu menghasilkan jam kerja selama 40 jam. Namun, mereka seringkali bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, bahkan seringkali pulang larut malam, atau masuk pada hari sabtu dan minggu tanpa dihitung lembur. Di sisi lain, pekerja Jepang sangat enggan meninggalkan kantor mereka sehingga mereka mengambil kurang dari setengah hak liburan mereka. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari fenomena *karooshi* bagi perusahaan di Jepang yaitu dapat mencerminkan bahwa manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, pengunduran diri sebagai atasan dari korban *karooshi* pada sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab. Belum lagi ganti rugi yang jumlahnya tidak sedikit untuk keluarga yang ditinggalkan.

Dalam menangani kasus *karooshi* ini, pemerintah Jepang sebenarnya sudah membuat beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan ada yang berhasil mengurangi jam kerja, tetapi tidak menghapus kebiasaan *karooshi* itu sendiri. Salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam program Reformasi Gaya Kerja, yaitu kebijakan “*No Overtime Day*” dan “*Premium Friday*” yang diberlakukan sampai saat ini. Strategi tersebut mampu menurunkan angka *karooshi* meski belum signifikan. Setidaknya dengan dibuatnya kebijakan seperti ini membuktikan bahwa pemerintah Jepang sadar akan bahaya dari fenomena *karooshi* itu sendiri dan ingin segera “lepas” darinya.